

Pertumbuhan Penduduk, Konversi Lahan, dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Badung

A.A. I. N. Marhaeni
Ni Nyoman Yuliarmi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

ABSTRAK

Melihat pentingnya kegiatan untuk melakukan kajian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Badung, maka dapat dirumuskan tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis peran ketersediaan air untuk irigasi, biaya pajak bumi dan bangunan, harga produk pertanian, tingkat kecepatan dalam memperoleh penghasilan, dan ketersediaan saprotan terhadap konversi lahan pertanian di Kabupaten Badung; Untuk mengkaji pengaruh konversi lahan pertanian dan pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan khususnya beras di Kabupaten Badung; Untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil selama ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam menjaga ketahanan pangan khususnya beras. jumlah responden sebanyak 50 orang petani yang telah mengkonversi atau menjual tanah pertaniannya untuk kegiatan ekonomi lainnya, Metode pengumpulan data yang digunakan ada berbagai metode yaitu observasi, wawancara, dan wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan adalah kombinasi teknik statistik deskriptif baik distribusi frekuensi tunggal maupun tabulasi silang dan teknik statistik asosiatif yaitu teknik regresi linear berganda. untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ada 3 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap konversi lahan pertanian yaitu ketersediaan air, persepsi tentang PBB.

Kata kunci: penduduk, pangan, konversi, lahan pertanian

ABSTRACT

Considering the importance of the activity to study food security in Badung regency, the objectives of this research are: To analyze the role of water availability for irrigation, the cost of land and building tax, the price of agricultural products, the rate of speed in obtaining income, and the availability of saprotan conversion of agricultural land in Badung Regency; To examine the effect of agricultural land conversion and population growth on food security especially rice in Badung Regency; To identify the steps taken so far by the local government of Badung Regency in maintaining food security especially rice. the number of respondents as many as 50 peasants who have converted or sold their agricultural land for other economic activities, data collection methods used there are various methods of observation, interviews, and in-depth interviews. The analytical technique used is a combination of descriptive statistical techniques both single frequency distribution and cross tabulation and associative statistical techniques that are multiple linear regression techniques. to see the effect of independent variables on the dependent variable. There are 3 variables that have significant effect on agriculture land conversion that is water availability, perception about PBB.

Keywords: population, food, conversion, agricultural land

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan sudah menjadi isu dunia terutama di negara-negara yang

sedang berkembang dan sering mengalami persoalan dalam hal ketahanan pangan yang dicerminkan oleh kasus-kasus kelaparan. Sesuai dengan Undang-undang No. 7

tahun 1996 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan, menjadi cermin bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas dalam pembangunan bangsa Indonesia untuk dapat mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan keberadaan Dewan Ketahanan Pangan ini adalah untuk membantu presiden dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Banyak faktor yang ikut terlibat dalam persoalan ketahanan pangan. Salah satu faktor yang paling penting adalah berkaitan dengan isu tentang pertumbuhan penduduk yang terus mengalami kecenderungan peningkatan. Data terakhir menunjukkan pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan, bahkan berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang terakhir tahun 2010 menjadi 2,15 persen, meningkat dari 1,26 persen pada periode Sensus Penduduk sebelumnya, dan semua kabupaten/kota mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk, bahkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan drastis ini tidak dapat dipungkiri karena persoalan migrasi penduduk. Kondisi migrasi ini pasti akan menambah beban dalam hal ketahanan pangan.

Selain persoalan pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi ketahanan pangan di Provinsi Bali, juga terkait dengan masalah persoalan luas lahan pertanian yang juga terus mengalami penurunan akibat konversinya ke penggunaan lain. Persoalan pangan ini sebenarnya sudah menjadi pembicaraan pada saat penduduk dunia tidak sebanyak sekarang ini. Apa yang dikatakan oleh Malthus akan dapat menjadi suatu kenyataan jika tidak ada usaha-usaha yang mengarah kepada pelipatgandaan nyata hasil produksi pertanian melalui penggunaan teknologi yang tepat. Malthus (1798) menyatakan

bahwa penduduk bertambah dengan deret ukur (eksponensial) dan makanan bertambah dengan deret hitung/aritmatika (Tawakal, 2011). Dengan pandangan Malthus tersebut dunia akan sangat rentan mengalami defisit pangan, yang berarti persoalan kelaparan dapat dikatakan menjadi sebuah ancaman bagi penduduk dunia. Kenyataan menunjukkan beberapa daerah/wilayah di Indonesia memiliki catatan mengalami kelaparan terutama saat kekeringan melanda wilayah-wilayah tersebut, demikian pula kelaparan di berbagai negara merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri (BKKBN dan PPK&PSDM Unud, 2012). Masalah ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan luas lahan pertanian yang dapat menghasilkan bahan-bahan makanan, namun sangat erat kaitannya dengan penduduk yang membutuhkan makanan tersebut. Jika pertumbuhan penduduk lebih rendah daripada pertumbuhan bahan pangan, maka mungkin ketahanan pangan tidak menjadi persoalan yang besar, namun jika terjadi hal yang sebaliknya, maka dapat dipahami kelaparan akan dapat menjadi ancaman. Tingkat pertumbuhan penduduk seperti dalam Tabel 1 yang terus meningkat di semua kabupaten/kota, dan luas lahan pertanian yang cenderung berkurang tidak menutup kemungkinan ketahanan pangan di Provinsi Bali mengalami masalah, jika tidak dilakukan usaha-usaha atau kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

Untuk dapat mengetahui apakah suatu daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi memiliki ketahanan di bidang pangan salah satu hal yang dapat dilihat adalah bagaimana perbandingan antara produksi dan konsumsi daerah yang bersangkutan untuk produk pangan tertentu. Menurut Undang-undang RI No.7 tahun 1996 Tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan dalam arti luas adalah mencakup makanan dan minuman, hasil-hasil tanaman dan ternak, serta ikan baik produk primer maupun olahan. Untuk masyarakat di Provinsi Bali dapat dikatakan beras sebagai pangan utama yang harus tersedia setiap saat, tidak saja untuk kebutuhan pangan atau makanan, namun juga untuk

No	Tahun	Produksi beras (ton)	Konsumsi Beras (ton)	Selisih (ton)
1	2006	462473,46	456097,5	6375,96
2	2007	461848,04	465219,4	- 3371,41
3	2008	442487,33	474523,8	- 32036,51
4	2009	483287,59	484014,3	- 726,73
5	2010	465804,7	493694,6	-27890,33

kebutuhan upacara. Dengan demikian beras yang dibutuhkan tentunya akan lebih banyak jika dibandingkan hanya untuk dikonsumsi (makan).

Berdasarkan data yang dapat tersedia jumlah konsumsi beras seluruh penduduk di Provinsi Bali, dan dibandingkan dengan jumlah beras yang mampu diproduksi oleh daerah sendiri, ada kecenderungan terus mengalami kekurangan dari tahun ke tahun.

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada kecenderungan konsumsi beras di Provinsi Bali selalu lebih tinggi daripada jumlah produksinya. Kondisi ini tentu saja akan mengancam kondisi ketahanan pangan Provinsi Bali, dan ini juga menunjukkan bahwa Bali sangat tergantung pada daerah lain untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan utamanya beras. Melihat kondisi ini kiranya sangat penting untuk dikaji mengenai kondisi ketahanan pangan khususnya beras di Provinsi Bali, untuk dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh, sehingga antisipasinya diharapkan dapat dilakukan.

Data yang menyatakan rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali terlihat sangat bervariasi. Satu pola yang terlihat untuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar rata-rata konsumsi beras per kapita paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kondisi ini dapat mengidentifikasi bahwa variasi makanan dalam satu wilayah akan mempengaruhi jumlah beras yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ada kecenderungan semakin bervariasi makanan

yang tersedia, maka konsumsi beras menjadi cenderung menurun, demikian sebaliknya. Untuk dapat mengetahui perbandingan antara jumlah produksi padi/beras dan konsumsi beras untuk dapat menyimpulkan terjadi kekurangan atau kelebihan produksi di masing-masing kabupaten/kota, data jumlah rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun harus dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada pada tahun yang bersangkutan. Nilai atau jumlah beras dari hasil perkalian jumlah penduduk dengan rata-rata konsumsi beras per kapita/tahun di masing-masing kabupaten/kota menunjukkan jumlah kebutuhan beras di kabupaten/kota tersebut pada satu saat tertentu.

Dengan memperhatikan pentingnya ketahanan pangan bagi suatu daerah khususnya Provinsi Bali, kiranya sangat penting untuk dapat diketahui bagaimana kondisi faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah peran ketersediaan air untuk irigasi, biaya pajak bumi dan bangunan, harga produk pertanian, tingkat kecepatan dalam memperoleh penghasilan, dan ketersediaan saprotan terhadap konversi lahan pertanian di Kabupaten Badung
- 2) Bagaimanakah persepsi informan tentang pengaruh konversi lahan pertanian dan pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan khususnya beras di Kabupaten Badung?
- 3) Apakah langkah-langkah yang diambil

selama ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam menjaga ketahanan pangan khususnya beras.

Ketahanan pangan khususnya beras di suatu daerah sangat penting untuk dapat dipertahankan agar tidak sampai terjadi kekurangan pangan pada satu saat tertentu. Fenomena menunjukkan jumlah produksi beras ada kecenderungan tidak mampu memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Bali. Melihat kondisi tersebut, maka tujuan dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Untuk menganalisis peran ketersediaan air untuk irigasi, biaya pajak bumi dan bangunan, harga produk pertanian, tingkat kecepatan dalam memperoleh penghasilan, dan ketersediaan saprotan terhadap konversi lahan pertanian di Kabupaten Badung
- 2) Untuk mengkaji persepsi informan tentang pengaruh konversi lahan pertanian dan pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan khususnya beras di Kabupaten Badung.
- 3) Untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil selama ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam menjaga ketahanan pangan khususnya beras.

STUDI PUSTAKA

Tekanan Penduduk

Kualitas hidup penduduk dapat mengalami penurunan, antara lain karena adanya tekanan penduduk akibat ketidakseimbangan antara kuantitas penduduk dengan sumber daya alam yang tersedia khususnya penduduk yang hidup di daerah agraris. Penduduk di wilayah agraris yang umumnya menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian, akan mengalami tekanan penduduk jika pertumbuhan penduduk di wilayah agraris yang akan mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja tidak mampu diserap oleh lahan pertanian yang tersedia. Secara umum lahan pertanian tidak akan dapat berkembang secepat pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja, bahkan malah lebih sering terjadi pengurangan lahan pertanian. Dengan demikian untuk mengurangi tekanan penduduk khususnya di daerah agraris, maka

pertumbuhan angkatan kerja yang utamanya berasal dari pertumbuhan penduduk harus dapat dikendalikan, demikian pula konversi lahan pertanian menjadi fungsi yang lainnya seyogyanya juga dikendalikan. Secara teoritis termasuk pula pada lahan pertanian, teknologi di bidang pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas lahan, juga dimungkinkan menjadi faktor yang dapat mengurangi tekanan penduduk. Tekanan penduduk dapat diketahui melalui indikator kepadatan penduduk dan kepadatan agraris. Mantra (2004) menyatakan kepadatan penduduk kasar adalah jumlah penduduk per km². Jadi kepadatan penduduk kasar atau kepadatan penduduk aritmatik dihitung dengan membandingkan banyaknya penduduk per satuan luas seperti ha atau km². Di sisi lain kepadatan yang berkaitan dengan ketersediaan lahan pertanian disebut sebagai kepadatan agraris dimana kepadatan penduduk agraris pembilangnya adalah jumlah petani setiap km² atau setiap ha (hektar) tanah pertanian. Jika luas lahan pertanian terus mengalami penyusutan di satu sisi, sedangkan di sisi lainnya pertumbuhan penduduk khususnya pertumbuhan penduduk yang bekerja di sektor pertanian (petani) maka kepadatan penduduk agraris akan semakin tinggi, yang menjadi cermin terjadi tekanan pada lahan pertanian yang selanjutnya dapat mengancam kondisi ketahanan pangan daerah.

Persoalan ketahanan pangan ini tidak hanya masalah produksi semata dari lahan pertanian yang ada, namun juga sangat penting menyangkut persoalan distribusi terhadap hasil produksi tersebut. Dengan kata lain ketahanan pangan tidak hanya menyangkut kecukupan produksi di tingkat nasional, namun juga di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan yang terpenting adalah di tingkat keluarga atau rumah tangga (BKKBN dan PPK&PSDM Unud, 2012). Selanjutnya disampaikan bahwa persoalan distribusi pangan sebagai bagian dari usaha untuk menjaga ketahanan pangan, sama pentingnya dengan persoalan produksi, karena tidak ada gunanya produksi melimpah tetapi keluarga atau rumah tangga yang membutuhkannya tidak kebagain sesuai dengan jumlah dan

No	Kabupaten	2009		2011		2009-2011
		Lahan Pertanian	Lahan Bukan Pertanian	Lahan Pertanian	Lahan Bukan Pertanian	Perubahan lahan pertanian
1	Jembrana	33 241	50 939	32 687	51 493	-554
2	Tabanan	62 491	21 442	62 483	21 450	-8
3	Badung	28 299	13 553	28 192	13 660	-107
4	Gianyar	27 337	9 463	27.276	9 524	-61
5	Klungkung	23 210	8 290	23.182	8 318	-28
6	Bangli	36 370	15 711	36.370	15 711	0
7	Karangasem	60 283	23 671	60.678	23 276	+ 395
8	Buleleng	81 583	55 005	81.418	55 170	-165
9	Denpasar	3 209	9 569	3 113	9 665	-96
10	Total	356 023	207 643	355 399	208 267	-624

waktu kebutuhannya. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, maka ketahanan pangan pada tingkat paling bawah yaitu di tingkat keluarga, seharusnya sangat diperhatikan dan akhirnya dapat menjadi ukuran untuk melihat keberhasilan kebijakan ketahanan pangan suatu Negara tidak terkecuali Negara Indonesia.

Untuk menjaga kondisi ketahanan pangan di Indonesia pemerintah membuat lembaga yang disebut Dewan Ketahanan Pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2006. Adapun tugas yang dibebankan kepada Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk oleh pemerintah ini sesuai yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) peraturan presiden tersebut dinyatakan Dewan membantu presiden dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi dan pengendalian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pasal 2 ayat (2) dalam peraturan presiden RI tersebut menyatakan kegiatan yang harus dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan meliputi beberapa hal yaitu di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi (BKKBN dan PPK&PSDM Unud, 2012). Persoalan pangan telah menjadi isu yang sangat sensitif mengingat pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, yang mendorong pemerintah harus mengatur dengan sebaik-baiknya agar masyarakat terjamin kecukupan pangannya.

Persoalan ketahanan atau keamanan pangan tidak hanya menjadi isu penting bagi negara lain seperti Negara China. Republik Rakyat China memiliki Undang-undang khusus untuk pangan/makanan. Undang-undang tersebut merupakan satu dari undang-undang dasar terakhir yang dimiliki negara tersebut untuk ketahanan/keamanan pangan memfokuskan pada pencegahan, pengontrolan, dan mengeliminasi faktor-faktor yang merusak/membahayakan dalam makanan untuk memastikan ketahanan/keamanan pangan. Undang-undang tersebut memasukkan sejumlah mekanisme yang resmi dan modern, termasuk sistem kriteria dari pangan yang aman, system evaluasi dari makanan yang bersiko, ganti rugi, dan pengungkapan informasi keamanan pangan

yang menjadi tonggak sejarah dari Undang-undang keamanan pangan negara China (Ming Qi, 2012)

Konversi Lahan Pertanian

Konversi lahan pertanian di Provinsi Bali berkaitan erat dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan yang lebih menekankan pada pembangunan sektor-sektor di luar pertanian seperti sektor jasa selain sektor manufaktur, mendorong konversi lahan akan semakin cepat. Pembangunan di sektor jasa misalnya akan membutuhkan lahan untuk pembangunan gedung, permukiman, perkantoran yang pasti akan mengurangi lahan pertanian yang ada. Banyak hal yang ikut memberikan andil terhadap terjadinya konversi lahan pertanian ke sektor lainnya, antara lain balas jasa di sektor lainnya yang dipandang lebih tinggi dibandingkan dengan di sektor pertanian. Jika bekerja di sektor jasa, maka penghasilan akan sudah diperoleh setiap bulan, namun jika bekerja di sektor pertanian tentu harus menunggu yang jauh lebih lama dari 1 bulan untuk mendapatkan hasilnya. Fenomena juga menunjukkan bahwa penduduk yang tergolong miskin sebagian besar berada di sektor pertanian dibandingkan dengan di luar sektor pertanian. Pembangunan di sektor-sektor lain yang lebih ditekankan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dipungkiri memberikan andil pada kecepatan konversi lahan pertanian untuk penggunaan lain. Berikut disampaikan perubahan penggunaan luas lahan di Provinsi Bali.

Tabel 2 menunjukkan bahwa di seluruh kabupaten/kota terjadi konversi lahan pertanian kecuali di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem. Kabupaten Bangli tidak mengalami penurunan lahan pertanian ataupun peningkatan, selama periode 1999-2011 dimana jumlah luas lahan pertanian dan non pertaniannya jumlahnya tetap sama. Berkurangnya lahan pertanian tidak saja mengancam ketahanan pangan juga mengancam kelestarian lingkungan. Selain mengancam ketahanan pangan seperti

yang telah disebutkan sebelumnya, konversi lahan pertanian ke penggunaan lainnya juga akan dapat mengancam kelestarian nilai-nilai budaya yang ada di Daerah Bali. Lahan pertanian secara fisik untuk menghasilkan padi (beras), namun lahan pertanian juga memiliki nilai sosial budaya, dimana keberadaan lahan pertanian khususnya sawah akan mendukung kelestarian lembaga sosial budaya yang dikenal dengan nama Lembaga Subak, sebagai organisasi tradisional yang mengatur pengairan atau irigasi di pertanian sawah. Dengan demikian konversi lahan pertanian yang tidak dapat dibendung tentu saja akan mengancam kelestarian Lembaga Subak di Bali.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi (2012) menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi konversi lahan pertanian ke penggunaan lain di Indonesia. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa desa-desa di Provinsi Bali yang telah mengalami konversi pada lahan pertaniannya sekitar 70,5 persen, sedangkan wilayah Jawa-Bali yang mengalami konversi sebanyak 52,7 persen, sedangkan secara nasional konversi lahan pertanian hanya terjadi sekitar 32,8 persen. Melihat data ini dapat disimpulkan bahwa desa-desa yang ada di Bali mengalami konversi lahan pertanian paling tinggi atau paling cepat di antara desa-desa yang ada di Indonesia. Hasil penelitian Suhaimi (2012) ini memperlihatkan bahwa jika dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Indonesia, desa-desa di Bali mengalami konversi lahan 2 kali lipat dibandingkan desa-desa lainnya di Indonesia. Kondisi ini tentu saja memerlukan kajian faktor-faktor apa saja yang ikut memberikan kontribusi terhadap kecepatan konversi tersebut. Penelitian yang akan dilakukan ini mencari jawaban terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab. Dengan demikian penelitian penting dilakukan, agar dapat dapat diperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mengerem laju konversi lahan pertanian.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian tentang ketahanan pangan ini akan dilakukan di Kabupaten Badung. Alasan pemilihan lokasi ini adalah Kabupaten Badung berkaitan dengan paling tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung pada periode Sensus Penduduk yang terakhir seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. Pertumbuhan penduduk yang dalam kategori meledak sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan daerah. Dengan adanya fenomena konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah yang dapat mengancam ketahanan pangan mengingat fenomena konversi lahan dan pertumbuhan penduduk yang meningkat terjadi diseluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali termasuk di Kabupaten Badung. Selain itu konversi lahan pertanian di Kabupaten ini untuk fasilitas kepariwisataan juga mempengaruhi luas lahan pertanian yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan dari daerah yang bersangkutan. Data menunjukkan lahan di Kabupaten Badung juga mengalami penurunan yang cukup banyak, sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah produksi beras dan pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Badung.

Populasi, Sampel dan Metode Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para petani yang telah menjual sawahnya atau mengkonversi lahan pertaniannya untuk penggunaan di luar sektor pertanian. Selain itu untuk menjawab tujuan penelitian dan memperkuat hasil-hasil penelitian, juga dibutuhkan informan seperti dari BULOG dan Dinas Pertanian serta Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Untuk memperoleh informasi tentang konversi lahan pertanian untuk penggunaan di sektor-sektor lainnya, maka akan diteliti juga informan dari Kantor Kecamatan yang mengetahui tentang keadaan tersebut. Informan-informan tersebut akan dipilih di beberapa kecamatan yang menghasilkan produksi padi yang relatif tinggi. Total responden dan informan di setiap kecamatan adalah sebanyak 10 orang. Dengan demikian total responden di seluruh

kabupatendi 5 kecamatan adalah sebanyak 50 orang. Metode pengambilan sampel baik untuk responden petani yang telah mengkonversi lahannya untuk penggunaan non pertanian atau menjual atau menyewakan lahan pertaniannya maupun masing-masing informan di 3 bidang tersebut, dilakukan secara non probability sampling khususnya purposive sampling, yaitu dengan sengaja ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian, yang dikombinasikan dengan accidental sampling.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian sosial termasuk dalam penelitian ini terdapat berbagai jenis metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang akan dipilih tergantung dari tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian sosial antara lain metode atau teknik observasi, wawancara, eksperimen, dan teknik survey (Jogiyanto, 2004). Untuk memperoleh data primer beberapa metode pengumpulan data akan digunakan seperti metode atau teknik observasi baik observasi non perilaku maupun observasi perilaku (Cooper & Emory, 1997). Metode pengumpulan data lainnya yaitu wawancara mendalam (indepth interview) juga akan digunakan untuk memperoleh informasi guna melengkapi data yang telah dikumpulkan melalui metode yang lainnya. Dengan wawancara mendalam kepada informan, peneliti dapat mengetahui alasan sebenarnya dari responden tentang suatu hal (Mantra, 2004). Indepth interview dilakukan pada responden informan yang terkait dengan obyek penelitian seperti dari BULOG, Dinas Pertanian, dan Pegawai atau staf atau kepala kecamatan.

Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disampaikan, maka dalam penelitian ini akan disampaikan hipotesis yang akan dibuktikan dengan menggunakan teknik statistik yang sesuai yaitu statistik dengan tingkatan asosiatif. Selain teknik statistik asosiatif untuk menjawab tujuan penelitian yang lainnya juga akan digunakan teknik statistik

deskriptif. Selanjutnya distribusi frekuensi tunggal maupun tabulasi silang akan dibuat setelah data diolah, untuk dapat melihat pola sebaran dari semua variabel penelitian yang dikumpulkan. Dengan demikian data yang telah dikumpulkan akan ditabulasi dan juga menggunakan statistik deskriptif lainnya. Berdasarkan hasil tersebut akan dibuatkan analisis secara deskriptif atau kualitatif untuk membahas pola maupun kecenderungan yang terjadi. Dengan demikian dalam penelitian ini teknik statistik yang akan digunakan adalah statistik deskriptif, dan teknik statistik asosiatif. Teknik statistik asosiatif yang akan digunakan adalah crosstas (Chi square) dan juga teknik regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Peran ketersediaan air untuk irigasi, biaya pajak bumi dan bangunan, harga produk pertanian, tingkat kecepatan dalam memperoleh penghasilan, dan ketersediaan saprotan terhadap konversi lahan pertanian di Kabupaten Badung.

Konversi terhadap lahan pertanian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan air untuk irigasi lahan pertanian tersebut. Kesulitan air yang dibutuhkan oleh petani dapat menjadi pendorong yang sangat kuat bagi petani untuk mengkonversikan lahan mereka. Ketiadaan air tentu saja menyebabkan para petani tidak mampu menghasilkan produk atau barang dari lahan pertanian mereka dalam hal ini produknya adalah padi. Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, tentu petani merasa rugi, dan tidak ada jalan lain kecuali mengkonversikan lahan yang dimiliki untuk usaha lainnya yang lebih memungkinkan untuk memperoleh penghasilan. Apalagi bagi para petani yang hanya mengandalkan lahan pertanian yang dimiliki sebagai satu-satunya sumber untuk mencari penghidupan, maka dapat diperkirakan apa yang akan dilakukan oleh para petani terhadap lahan mereka untuk mendapatkan penghasilan. Dari pemahaman dan logika semakin sulit petani memperoleh air untuk irigasi persawahan mereka, maka

semakin tinggi kemungkinan petani untuk menjual atau mengkonversikan lahan pertanian mereka. Berikut ini hasil statistik pengaruh beberapa variabel terhadap konversi lahan yang dilakukan petani di Kabupaten Badung.

Sebelum dilakukan analisis secara parsial untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel serta arah pengaruh masing-masing variabel tersebut, maka dilakukan uji simultan untuk melihat model yang digunakan fit atau tidak fit, cocok atau tidak cocok. Berdasarkan nilai yang ada pada Tabel 4.1. dapat dilihat signifikansi sebesar 0,003 dengan nilai F sebesar 4,365. Dengan nilai statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan (ketersediaan air untuk irigasi, biaya dan persepsi terhadap PBB, harga produk pertanian, kecepatan memperoleh penghasilan, dan ketersediaan saprotan) secara simultan mempengaruhi dependen variabel dalam hal ini konversi lahan pertanian. Hal ini berarti model ini dapat digunakan untuk melakukan analisis selanjutnya yaitu analisis secara parsial pengaruh dari variabel-variabel tersebut. Hasil pengolahan secara parsial disampaikan dalam Tabel 4.

(1) Ketersediaan air untuk irigasi (B1) Variabel ketersediaan air untuk irigasi, variabel ini memberikan pengaruh negatif terhadap konversi lahan, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,144, dengan nilai t sebesar -2,130, dengan signifikansi 0,039. Dalam penelitian ilmu sosial nilai signifikansi yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah variabel berpengaruh signifikan ataukah tidak digunakan tingkat signifikansi atau alpha sebesar 0,01; 0,05; dan 0,10. Dalam penelitian ini tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,10 atau 10 persen, dengan pertimbangan variabel yang digunakan cukup banyak sedangkan jumlah responden yang digunakan relatif sedikit. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air berpengaruh signifikan pada taraf 3,9 persen (berpengaruh signifikan) dengan arah negatif. Hal ini berarti semakin tinggi ketersediaan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.242	.524		8.090	.000
	B1	-.144	.067	-.287	-2.130	.039
	B2	.322	.092	.498	3.498	.001
	B3	.207	.265	.104	.781	.439
	B4	-.114	.060	-.272	-1.896	.065
	B5	-.037	.078	-.064	-.479	.634

air untuk irigasi sawah para petani, maka semakin rendah kemungkinan petani untuk mengkonversi lahan mereka untuk kegiatan lainnya. Sebaliknya semakin rendah ketersediaan air untuk irigasi sawah para petani, maka semakin tinggi kemungkinan petani untuk mengkonversi atau menjual lahan mereka untuk kegiatan lainnya. Dengan demikian jika memang pemerintah menghendaki luas lahan pertanian di Kabupaten Badung ini tetap terjaga dan tidak boleh dikonversi oleh para petani, maka pemerintah haruslah mencari cara atau usaha untuk menjaga ketersediaan air bagi para petani, sekarang maupun sampai masa yang akan datang, sehingga kemungkinan para petani mengkonversi lahannya akibat ketidakterediaan air untuk irigasi dapat diperkecil. Di sini memang besar peran dan komitmen pemerintah daerah atau pemerintah pusat jika memang setulus hati ingin membangun sektor pertanian di wilayah ini, sesuai dengan klasifikasi Negara sebagai Negara Agraris.

(2) Biaya dan persepsi terhadap PBB

Dalam kenyataannya petani harus membayar biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian yang mereka miliki. Tidak peduli apakah lahan tersebut menghasilkan atau tidak, dan jumlah biaya PBB yang harus mereka bayarkan sangat tergantung

dari lokasi dimana tanah atau lahan tersebut berada dan berapa luas lahan yang dimiliki. Semakin strategis lahan pertanian tersebut dan semakin luas, maka semakin besar biaya PBB yang akan dibayar oleh para petani. Persoalannya jika lahan sering tidak menghasilkan misalnya karena ketiadaan sumber air, ataupun hasilnya tidak sesuai harapan di satu sisi dan disisi lain biaya PBB harus dibayar, maka biaya dan persepsi petani terhadap PBB juga dapat mempengaruhi kemungkinan petani mengkonversi lahan pertaniannya.

Hasil analisis menunjukkan koefisien regresi yang dihasilkan bertanda positif yaitu 0,322 dengan nilai t sebesar 3,498 dengan signifikansi 0,001. Hasil analisis ini mencerminkan bahwa variabel biaya dan persepsi terhadap PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap konversi lahan pertanian yang dilakukan oleh petani. Koefisien yang bertanda positif ini memberikan arti bahwa semakin tinggi biaya dan persepsi terhadap biaya PBB yang harus dibayar oleh petani, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya konversi lahan yang dilakukan oleh para petani. Demikian sebaliknya semakin rendah biaya dan persepsi terhadap biaya PBB, maka semakin rendah pula kemungkinan petani untuk mengkonversikan lahan pertanian mereka. Jika petani merasa berat untuk membayar biaya PBB jika dibandingkan

dengan hasil yang diperoleh dari sektor pertanian, maka kemungkinan para petani untuk mengkonversikan lahannya juga akan semakin tinggi, semikian sebaliknya. Kenyataan ini juga sebenarnya harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah jika menginginkan petani tidak menjual atau mengkonversikan lahannya, misalnya memberikan keringanan biaya PBB pada para petani tersebut, sehingga berkurang motivasi petani untuk menjual atau mengkonversikan lahannya. Namun selama ini sepertinya kebijakan itu belum dilakukan oleh pemerintah, tidak ada pertimbangan untuk memperhatikan kondisi para petani tersebut dengan memberikan keringanan pembiayaan PBB untuk lahan pertanian.

(3) Harga Produk Pertanian

Harga produk pertanian sering juga dijadikan sebagai alasan untuk mengkonversikan atau menjual lahan pertanian karena menganggap harga produk pertanian lebih murah dibandingkan dengan harga produk di luar pertanian. Semakin rendah petani merasakan harga produk pertaniannya dibandingkan dengan produk dari sektor lainnya maka semakin tinggi kemungkinan petani untuk menjual lahan atau mengkonversikan lahannya, demikian sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan variabel ini yaitu harga produk pertanian memiliki koefisien regresi yang bertanda positif, dengan nilai 0,207, dengan nilai $t = 0,781$, dan tingkat signifikansi 0,439. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel harga produk pertanian ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, artinya secara umum variabel ini tidak berpengaruh terhadap kemungkinan petani mengkonversikan lahannya. Harga produk pertanian ini sepertinya memiliki keterkaitan dengan variabel lainnya, misalnya meskipun harga produk pertanian yang dirasakan oleh para petani itu tinggi, namun kalau tidak cukup tersedia air untuk lahan pertaniannya, maka akan ada kemungkinan yang tinggi untuk menjual atau mengkonversikan lahan pertaniannya. Jadi ada kemungkinan variabel lainnya yang lebih kuat mempengaruhi responden untuk mengkonversikan lahannya,

sehingga variabel harga produk pertanian tidak terlihat sebagai variabel yang penting perannya, dalam mempengaruhi konversi lahan.

Tabel 4.2: Nilai Statistik Pengaruh Beberapa Variabel Terhadap Konversi Lahan

Keterangan: B1: Ketersediaan air untuk irigasi
 B4: Kecepatan memperoleh penghasilan
 B2: Biaya dan persepsi terhadap PBB
 B5: Ketersediaan saprotan
 B3: Harga produk pertanian
 Y: Konversi lahan

(4) Kecepatan Memperoleh Penghasilan
 Hasil di sektor pertanian sering dikategorikan lambat dibandingkan dengan sektor lainnya, artinya untuk memperoleh hasil di sektor pertanian misalnya padi akan membutuhkan waktu beberapa bulan sedangkan di sektor lainnya misalnya usaha dagang, setiap hari sudah dapat diperoleh hasilnya. Kecepatan memperoleh penghasilan di sektor pertanian juga dapat menjadi pemicu petani mengkonversikan lahannya. Semakin cepat hasil atau penghasilan yang diperoleh, ada kecenderungan semakin rendah kemungkinan konversi yang dilakukan oleh petani, demikian sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kecepatan memperoleh penghasilan memiliki koefisien regresi dengan tanda negatif - 0,114 dengan nilai $t = - 1,896$ dan tingkat signifikansi 0,065. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 10 persen, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kecepatan memperoleh penghasilan ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konversi lahan pertanian. Hal ini berarti semakin cepat kemungkinan sektor pertanian memperoleh hasil atau pendapatan, maka semakin rendah kemungkinan petani akan mengkonversikan lahannya. Sebaliknya semakin lambat hasil yang dirasakan oleh petani, maka semakin tinggi kemungkinan petani untuk mengkonversikan lahannya. Lama waktu tanam berbagai jenis tanaman tentu berbeda, sehingga kecepatan dalam memperoleh penghasilan juga akan

berbeda, ada tanaman yang cepat dalam memberikan hasil, dan ada juga yang lambat. Kecepatan dalam memperoleh penghasilan ini memberikan pengaruh yang signifikan pada penelitian ini terhadap konversi lahan pertanian.

(5) Ketersediaan Saprotan

Ketersediaan Saprotan atau sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, pestisida, dan lainnya juga diperkirakan dapat menjadi penyebab petani untuk mengkonversikan lahannya. Jika petani merasa sulit mendapatkan sarana produksi pertaniannya dan terus-menerus atau sering terjadi, maka dapat menjadi dorongan petani untuk mengkonversikan atau menjual lahannya, demikian sebaliknya. Dari analisis yang telah dilakukan variabel ketersediaan Saprotan berpengaruh negatif dengan koefisien regresi sebesar $-0,037$, dengan nilai t sebesar $-0,479$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,634$. Pengaruh negatif berarti semakin tersedia Saprotan atau semakin gampang petani mencari Saprotan maka semakin rendah kemungkinan petani mengkonversikan lahannya. Sebaliknya terjadi semakin sulit atau semakin tidak tersedia Saprotan, maka semakin tinggi kemungkinan petani mengkonversikan lahannya. Hasil ini tandanya sesuai dengan logika atau harapan. Namun variabel ini memberikan pengaruh yang tidak signifikan, dengan kata lain variabel ketersediaan saprotan tidak berpengaruh signifikan terhadap konversi lahan pertanian. Hal ini juga memberikan arti bahwa ada variabel lainnya yang lebih besar peranannya dalam mempengaruhi konversi lahan responden.

2) Persepsi informan tentang pengaruh konversi lahan pertanian dan pertumbuhan penduduk terhadap ketahanan pangan khususnya beras di Kabupaten Badung

Secara umum di Provinsi Bali, sektor pertanian masih tetap merupakan sektor yang sangat diharapkan untuk dapat berkembang selain berkaitan dengan ketahanan pangan secara umum, namun juga sangat berkaitan dengan produk-produk pertanian yang dapat

menunjang sektor pariwisata di Provinsi Bali. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Badung juga tidak dapat diabaikan, pada tahun 2012, sumbangan sektor pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Badung menduduki urutan ke 4 setelah sektor perdagangan, hotel, restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Dengan demikian sumbangan yang diberikan oleh sektor pertanian relatif tinggi yaitu menduduki urutan ke 4 dari 9 sektor yang ada. Mengingat kondisi ini, maka pemerintah daerah dan bekerja sama dengan masyarakat harus bersama-sama berusaha mempertahankan lahan pertanian yang ada atau kalau memungkinkan untuk menambah luasnya, sehingga ketahanan pangan dapat terjaga dengan baik. Ketiadaan konversi lahan pertanian selain berkaitan dengan ketahanan pangan daerah, juga erat kaitannya dengan penyediaan produk-produk hasil pertanian yang mendukung industri kepariwisataan seperti beras, sayur-sayuran, maupun buah-buah. Keberhasilan industri pariwisata juga ditentukan oleh sejauh mana sektor pertanian yang ada dapat memberikan dukungan terhadap eksistensi sektor pariwisata di kabupaten ini. Apalagi jika diperhatikan Kabupaten Badung memiliki wilayah yang paling banyak digunakan untuk industri kepariwisataan di antara semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Jadi Kabupaten Badung yang paling banyak memiliki kawasan yang mendukung industri pariwisata, sehingga ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting bagi kabupaten ini dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakatnya termasuk usaha-usaha yang ada.

Hasil produksi pertanian ditentukan oleh 2 hal yaitu luas lahan dan produktivitas lahan. Produktivitas lahan per ha, akan dapat diperbaiki melalui berbagai cara dan metode, namun luas lahan harus dipertahankan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama, karena luas lahan sangat sulit untuk ditingkatkan atau dapat dikatakan tidak dapat ditingkatkan luasnya. Dengan demikian yang dapat diintervensi atau dimanipulasi adalah produktivitas lahan per

hektar, sehingga dengan luas lahan yang tetap akan terjadi kenaikan jumlah produksi hasil-hasil pertanian yang akan menjadi sumber ketahanan pangan daerah. Di sisi lain jika produktivitas lahan dapat ditingkatkan dengan baik, namun luas lahan berkurang atau ada konversi luas lahan pertanian ke penggunaan lainnya dengan proporsi yang lebih besar, maka jumlah produksi sektor pertanian akan berkurang yang akan dapat mengancam ketahanan pangan daerah. Dapat dikatakan mempertahankan luas lahan menjadi suatu kegiatan yang demikian penting dalam menjaga ketahanan pangan. Tidak akan ada gunanya meningkatkan produktivitas lahan atau manfaatnya akan berkurang, jika akhirnya akan dihapuskan oleh berkurangnya luas lahan ada akibat konversi ke penggunaan lainnya. Ketahanan pangan suatu daerah akan dapat dijaga dengan baik jika luas lahan pertanian dapat dipertahankan, dan ada peningkatan produktivitas lahan sampai pada tingkat tertentu. Dari segi internal ketahanan pangan ditentukan oleh 2 variabel tersebut yaitu luas lahan dan tingkat produktivitas lahan, namun dari sisi eksternal ketahanan pangan ditentukan oleh perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin rawan ketahanan pangan suatu daerah, jika variabel lainnya dalam keadaan konstan.

Sesuai dengan Teori Malthus, penduduk akan bertambah seperti deret ukur, sedangkan bahan pangan atau makanan akan bertambah seperti deret hitung. Dengan teori ini dapat dimaknai bahwa akan terjadi kerawanan pangan bahkan mungkin kelaparan jika pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan, sedangkan bahan makanan tidak dapat dinaikkan sesuai dengan harapan.

(1) Konversi lahan

Seperti daerah-daerah lainnya yang mengalami konversi lahan pertanian ke penggunaan lainnya, Kabupaten Badung juga mengalami hal yang sama. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya selama 2 tahun yaitu tahun 2009 sampai tahun 2011 semua kabupaten/kota mengalami konversi lahan pertaniannya yang berubah menjadi lahan bukan pertanian. Data Tabel 5.16 menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami perubahan lahan pertanian menjadi lebih sempit, sehingga akan mempengaruhi luas lahan untuk hasil produksi pertanian. Hanya Kabupaten Karangasem yang mengalami penambahan luas lahan pertanian, terutama pertanian lahan kering. Data menunjukkan Kabupaten Jembrana mengalami pengurangan jumlah lahan yang paling banyak yang mencapai 554 Ha, yaitu sekitar 1,67 persen, Kabupaten Tabanan yang mengalami pengurangan

No	Kabupaten	2009	2011	2009-2011
		Lahan Pertanian	Lahan Pertanian	Perubahan lahan pertanian
1	Jembrana	33 241	32 687	-554
2	Tabanan	62 491	62 483	-8
3	Badung	28 299	28 192	-107
4	Gianyar	27 337	27.276	-61
5	Klungkung	23 210	23.182	-28
6	Bangli	36 370	36.370	0
7	Karangasem	60 283	60.678	+ 395
8	Buleleng	81 583	81.418	-165
9	Denpasar	3 209	3 113	-96
10	Total	356 023	355 399	-624

paling sedikit yaitu hanya 8 Ha atau sekitar 0,013 persen, Kabupaten Badung mengalami pengurangan sebanyak 107 Ha atau sekitar 0,38 persen, Kabupaten Bangli memiliki luas lahan yang tetap, tidak mengalami konversi lahan pertanian, Kabupaten Karangasem meningkat lahan pertaniannya sekitar 0,66 persen. Kabupaten Buleleng mengalami konversi lahan sekitar 0,20 persen, Kota Denpasar sekitar 2,99 persen, Kabupaten Klungkung sekitar 0,12 persen, dan Kabupaten Gianyar sekitar 0,22 persen. Berdasarkan data tersebut secara absolut Kabupaten Jembrana yang mengalami konversi lahan yang paling banyak, sedangkan Kota Denpasar mengalami penurunan lahan pertanian paling banyak secara persentase sampai 2,99 persen. Hanya Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar yang mengalami penurunan lahan pertanian di atas 1 persen, dan sisanya mengalami penurunan di bawah 1 persen, termasuk Kabupaten Badung yang menurun 0,38 persen. Walaupun hanya 0,38 persen dari total lahan pertanian, namun jika dilihat jumlahnya sudah mencapai ratusan Ha. Jika keadaan ini terjadi secara terus menerus, maka dapat dipastikan penurunan luas lahan akan mempengaruhi ketahanan pangan daerah. Jika lahan pertanian setiap Ha nya menghasilkan produk padi sebanyak 58,43 kwintal pada tahun 2011 (BPS Provinsi Bali,

2012), maka akan terjadi pengurangan hasil produksi sebanyak 6.252,01 kwintal atau 6,252 ton jika diasumsikan semua pengurangan lahan pertanian tersebut adalah pada lahan sawah. Jika terus menerus luas lahan pertanian berkurang, maka hasil produksi pertanian juga akan berkurang secara terus menerus. Kondisi ini akan membahayakan ketahanan pangan daerah jika tidak ada usaha-usaha yang lainnya yang dapat mengatasi persoalan tersebut. Data perubahan luas lahan pertanian di setiap kabupaten/kota disampaikan dalam Tabel 5

(2) Jumlah penduduk

Jumlah penduduk suatu daerah di suatu daerah memiliki 2 sisi dalam kaitannya dengan proses produksi, yaitu sebagai faktor produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa di satu sisi, dan di sisi lain penduduk membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk barang-barang hasil produksi pertanian. Dengan demikian dapat dikatakan jumlah penduduk sangat menentukan kebutuhan akan pangan suatu daerah. Jumlah penduduk di Kabupaten Badung terus mengalami penambahan dari waktu ke waktu, penambahan ini disamping disebabkan oleh kelahiran, namun juga disebabkan oleh migrasi penduduk. Di Kabupaten Badung

ada Indikasi mengalami migrasi masuk yang jauh lebih tinggi daripada migrasi keluar. Migrasi masuk yang lebih tinggi daripada migrasi keluar akan berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Badung, dalam arti net migrasi yang positif menyebabkan jumlah penduduk Kabupaten Badung akan bertambah. Selain karena migrasi masuk, jumlah kelahiran juga akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk suatu daerah. Selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian yang positif menyebabkan jumlah penduduk di suatu daerah akan bertambah dibandingkan sebelumnya, demikian sebaliknya. Untuk Kabupaten Badung dan kabupaten/kota lainnya ada kecenderungan jumlah kelahiran pada satu periode waktu tertentu lebih banyak daripada jumlah kematian pada tahun yang bersangkutan sehingga selisih jumlah kelahiran dan kematian menjadi positif, dan hal ini akan menambah jumlah penduduk pada satu periode tertentu. Berikut disampaikan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Badung selama 3 periode Sensus Penduduk (SP) dalam Tabel 5.17 berikut.

Jumlah penduduk Kabupaten Badung terus mengalami pertumbuhan dari Sensus Penduduk tahun 1990 ke tahun 2000, dan sampai periode terakhir tahun 2010. Jumlah penduduk Kabupaten Badung bertambah sebanyak 71.223 orang selama periode tahun 2000 ke tahun 1990, dengan pertambahan rata-rata per tahun sebanyak 7.122 orang. Pada periode berikutnya yaitu tahun 2010 ke tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Badung bertambah sebanyak 197.469 orang, dengan rata-rata pertambahan penduduk per tahun sebanyak 19.747 orang. Pertambahan penduduk selama periode sensus yaitu 10 tahun, jauh lebih banyak pada periode kedua dibandingkan dengan periode pertama. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pangan terus bertambah dari waktu ke waktu dan pertambahannya terlihat semakin banyak. Jika pengendalian jumlah penduduk baik melalui kebijakan migrasi penduduk maupun pembatasan jumlah kelahiran, maka dapat dipastikan pertambahan jumlah penduduk

pada periode 2000 ke 2010 akan lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah kelahiran yang meningkat selama 10 tahun dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berumur 0-4 tahun dan 5-9 tahun pada masing-masing periode sensus (BPS, 1992, 2002, 2012).

Jumlah kelahiran sampai dengan tahun 1990 dari periode Sensus Penduduk sebelumnya yaitu tahun 1980 (selama 10 tahun), sebanyak 42.206 jiwa yang dicerminkan oleh penduduk yang berumur 0-9 tahun (0-4 tahun dan 5-9 tahun). Namun demikian pada periode berikutnya yaitu kelahiran selama tahun 1990-2000, jumlahnya meningkat yaitu menjadi 58.789 jiwa. Hal yang sama juga terlihat pada periode berikutnya yaitu dari 2000-2010 jumlah kelahiran meningkat lagi yang dicerminkan dari penduduk yang berumur 0-4 tahun dan 5-9 tahun yang berjumlah 97.267 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa selama 3 periode Sensus Penduduk jumlah kelahiran di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Jumlah pertambahan kelahiran selama 10 tahun selama periode Sensus Penduduk masing-masing juga terlihat mengalami peningkatan. Pada 2 periode Sensus Penduduk sebelumnya jumlah kelahiran meningkat sebanyak 16.583 jiwa, namun pada Sensus Penduduk yang terakhir jumlah kelahiran meningkat sebanyak 38.478 jiwa. Data tersebut mencerminkan kenaikan jumlah kelahiran selama 3 periode sensus penduduk tersebut lebih daripada 2 kali lipat. Dengan melihat kondisi ini dapat diperkirakan jumlah kelahiran yang mungkin terdata pada sensus penduduk berikutnya yaitu tahun 2020 akan jauh lebih banyak lagi dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Badung saat ini sudah banyak dan ada kecenderungan akan ada migrasi masuk lagi ke kabupaten ini selama periode tersebut yang dapat menyebabkan jumlah kelahiran akan berlipat ganda. Jumlah kelahiran yang meningkat seperti ini dan adanya kecenderungan jumlah migrasi masuk ke kabupaten ini dengan selisih yang positif akan menyebabkan jumlah penduduk terus meningkat, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi katahanan pangan di

kabupaten ini. Pengaruh jumlah penduduk ini terhadap ketahanan pangan akan searah dengan pengaruh dari menurunnya luas lahan pertanian akibat adanya konversi lahan pertanian untuk penggunaan lainnya.

3) Langkah-langkah yang diambil selama ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam menjaga ketahanan pangan khususnya beras

Secara konseptual atau secara teoritis demikian besar pengaruh atau peran dari jumlah penduduk dan konversi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di suatu daerah tertentu. Jika hanya mengandalkan hasil produksi sendiri dengan kenyataan jumlah penduduk meningkat dengan pesat, sedangkan luas lahan pertanian berkurang, maka kemungkinan ketahanan pangan menjadi terancam sangatlah tinggi kemungkinannya. Untuk kasus di Kabupaten Badung dengan jumlah penduduk yang meningkat dengan pesat dan luas lahan pertanian yang juga berkurang seperti data yang telah disampaikan, maka perlu dicari informasi secara empiris mengenai ketahanan pangan khususnya beras, dengan melalui wawancara mendalam dengan informan yang menangani persoalan tersebut. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 2 orang narasumber yaitu Kabid Produksi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Badung dan dengan Pegawai Perum Bulog Provinsi Bali, Hasilnya disarikan dalam penjelasan berikut.

Jumlah penduduk Kabupaten Badung yang terus meningkat dan luas lahan pertanian yang juga berkurang, sepertinya tidak akan mengancam ketahanan pangan dari Kabupaten Badung. Hal ini didasarkan atas beberapa kenyataan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Badung yang secara nyata dapat menunjang kondisi ketahanan pangan kabupaten ini. Agar petani di kabupaten ini tetap bersedia menanam padi atau tetap mengusahakan lahan pertaniannya untuk ditanami padi atau tidak dikonversikan ke penggunaan lainnya, maka beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten ini melalui dinas terkait antara lain

memberikan subsidi benih kepada petani, dimana petani hanya membayar 25 persen. Dengan subsidi ini diharapkan petani merasa terbantu di dalam proses produksinya dan merasa diperhatikan oleh pemerintah, serta kegiatan pertanian mereka menjadi aktivitas yang sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan daerah. Selain subsidi pada bibit/benih, subsidi juga dilakukan pada pembelian pupuk yang diperlukan oleh petani dalam melaksanakan proses produksinya. Subsidi ini juga diharapkan dapat meringankan beban petani dalam menyediakan kebutuhan pupuk untuk lahan pertanian mereka, sehingga mereka merasa terbantu dan diharapkan tetap mengusahakan lahan pertanian mereka. Kegiatan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait adalah menstabilkan harga gabah petani, melalui pembelian gabah oleh pemerintah yang sesuai dengan harga pasar. Dengan pembelian gabah oleh pemerintah, diharapkan para petani tidak akan merasa kesulitan menjual hasil pertanian mereka jika musim panen tiba. Dengan demikian meskipun pada saat panen raya, petani tetap dapat menjual produk pertanian mereka dengan harga pasar yang relatif tinggi. Untuk itu pemerintah daerah akan menyalurkan gabah yang dibeli kepada petani setelah menjadi beras yang dijual kepada seluruh PNS yang adadi kabupaten Badung. Hal ini berarti petani tidak akan kesulitan dalam menjual produk pertanian mereka. Kepastian dalam menjual produk pertanian juga menjadi dorongan tersendiri bagi petani untuk tidak mengkonversikan atau menjual lahan sawah mereka. Kondisi ini akan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung juga melakukan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas lahan, dan ekstensifikasi sebanyak 100 ha sawah di Belok Sidan, yang telah dibuatkan terowongan air untuk pengairan sawah baru tersebut. Selain itu dilakukan juga perbaikan jaringan irigasi sehingga ketersediaan air terjamin, dan juga pembuatan jalan usaha tani, dengan pembebasan lahan sebanyak 2 meter sehingga

transportasi menjadi lancar. Dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa Kabupaten Badung mengalami surplus beras pada beberapa tahun ini, yang terakhir terjadi pada tahun 2012. Dengan beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dinas terkait dan kenyataan yang ada di Kabupaten Badung, maka informan menyimpulkan atau memiliki pandangan/persepsi bahwa Kabupaten Badung tidak akan mengalami ancaman pada ketahanan pangan khususnya beras meskipun terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan juga terjadi pengurangan lahan pertanian, mengingat berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Perum Bulog Provinsi Bali yang mewilayahi seluruh kabupaten/kota di Bali, juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Provinsi Bali secara umum maupun Kabupaten Badung khususnya tidak ada masalah berkaitan dengan kekurangan pangan khususnya beras. Hal ini berkaitan dengan komitmen pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan di Negara ini, hal ini juga berdampak pada ketahanan pangan di daerah-daerah yang juga akan dapat terjaga dengan baik, termasuk di Kabupaten Badung. Ketahanan pangan ini dijaga melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dimana di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki cadangan 100 ton dan 200 ton untuk Provinsi Bali, sehingga secara keseluruhan cadangan beras di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Bali sebanyak 1100 ton. Pemerintah juga melakukan antisipasi melalui impor beras jika produksi dalam negeri tidak mencukupi, namun demikian pada tahun 2012, dan 2013 pemerintah Indonesia tidak melakukan impor beras karena cadangan masih cukup, sampai mungkin kira-kira pertengahan tahun 2014 masih mencukupi. Selain itu ada perjanjian antar negara, yaitu antar Negara Indonesia dengan beberapa negara lainnya untuk saling membantu jika terjadi kekurangan pangan khususnya beras. Dengan demikian Negara memberikan jaminan bahwa tidak akan ada kerawanan pangan di seluruh negara termasuk di Provinsi Bali, demikian pula di

Kabupaten Badung.

Satu hal yang sangat penting yang dapat dikatakan menjamin ketahanan pangan di Kabupaten Badung khususnya, demikian pula di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali adalah adanya Perdagangan Antar Pulau yang dilakukan oleh pihak swasta. Data mengenai Perdagangan Antar Pulau ini tidak terdata dengan baik, yang kemungkinannya lebih banyak terjadinya dibandingkan dengan data yang ada. Perdagangan Antar Pulau berkaitan dengan produk beras ini dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Badung, apalagi ada kenyataan bahwa sampai tahun 2012 data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Badung mengalami surplus beras dari hasil produksi lokal (produksi sendiri) jika dibandingkan dengan kebutuhan sendiri. Berdasarkan kedua persepsi atau pendapat informan tersebut dan dengan melihat kenyataan yang ada, maka dapat disimpulkan mereka memandang bahwa meskipun terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Badung dan ada kenyataan bahwa luas lahan pertanian mengalami penurunan, Kabupaten Badung tidak akan mengalami kerawanan pangan, dalam arti ketahanan pangan Kabupaten Badung tidak akan terancam, atau selalau ada dalam kondisi terjamin.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1) Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air berpengaruh signifikan pada taraf 3,9 persen (berpengaruh signifikan) dengan arah negatif. Hal ini berarti semakin tinggi ketersediaan air untuk irigasi sawah para petani, maka semakin rendah kemungkinan petani untuk mengkonversi lahan mereka untuk kegiatan lainnya; (2) Hasil analisis ini mencerminkan bahwa variabel biaya dan persepsi terhadap PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap konversi lahan pertanian yang dilakukan oleh petani. Koefisien yang bertanda positif ini memberikan arti bahwa semakin tinggi biaya dan persepsi terhadap biaya PBB yang harus dibayar oleh petani, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya konversi

lahan yang dilakukan oleh para petani; (3) Hasil ini menunjukkan bahwa variabel harga produk pertanian ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, artinya secara umum variabel ini tidak berpengaruh terhadap kemungkinan petani mengkonversikan lahannya; (4) Variabel kecepatan memperoleh penghasilan ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konversi lahan pertanian. Hal ini berarti semakin cepat kemungkinan sektor pertanian memperoleh hasil atau pendapatan, maka semakin rendah kemungkinan petani akan mengkonversikan lahannya; (5) Variabel ketersediaan saprotan ini memberikan pengaruh negative tetapi tidak signifikan, dengan kata lain variabel ketersediaan saprotan tidak berpengaruh signifikan terhadap konversi lahan pertanian.

2) Informan mempersepsikan bahwa tidak ada pengaruh jumlah penduduk dan konversi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan Kabupaten Badung secara empiris. Secara teoritis hal tersebut memang benar adanya. Namun secara empiris di Kabupaten Badung kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap ketahanan pangan kabupaten ini mengingat ada berbagai program yang dilaksanakan baik oleh Pemda Badung sendiri, maupun pemerintah pusat.

3) Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan daerah adalah dengan melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi. Beberapa program intensifikasi yang dilaksanakan antara memberikan bantuan benih kepada petani, memberikan subsidi pupuk, menstabilkan harga gabah dari petani dengan membeli gabah petani, menjual beras harus petani kepada PNS Badung. Selain itu petani juga diberikan pupuk organik untuk meningkatkan kualitas lahan, dan pembuatan jalan usaha tani, serta perbaikan jaringan irigasi. Program ekstensifikasi yang dilaksanakan adalah menambah luas lahan pertanian sawah dengan mengurangi lahan perkebunan sebanyak 100 ha di Desa Belok Sidan.

Saran-saran

1) Melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung, mengingat

tingkat pertumbuhan penduduk di kabupaten ini sangat tinggi bahkan tertinggi di Provinsi Bali, dan pertumbuhan penduduk merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu daerah. Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan melakukan berbagai upaya baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Melakukan berbagai upaya untuk membantu agar petani tidak melakukan konversi lahan pertaniannya dan tetap mengusahakannya menjadi lahan pertanian, misalnya melalui keringanan dalam pembayaran pajak PBB, dan pemerintah daerah dapat membantu meringankan beban mereka

3) Ketersediaan air untuk irigasi sawah para petani menjadi hal yang sangat penting mengingat dari hasil penelitian, ketersediaan air berpengaruh negatif signifikan terhadap konversi lahan pertanian. Perbaikan irigasi seperti yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus tetap dipertahankan dan malahan harus dicari cara-cara untuk meningkatkan volume air selain untuk irigasi lahan sawah yang baru juga sangat perlu untuk sawah yang lama, sehingga dapat menghemat petani untuk tidak mengkonversikan lahan pertaniannya ke penggunaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BKKBN dan PPK & PSDM Unud. 2012. Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Denpasar : BKKBN dan PPK & PSDM Unud

Badan Pusat Statistik. 2012. Bali Dalam Angka 2011. Denpasar : BPS

Cooper & William, Emory. 1997. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta : Penerbit Erlangga

I GN Santosa, Gede Menaka Adnyana dan I Ketut Kartha Dinata. 2011. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Beras. Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian, Urgensi dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. | Bengkulu 7 Juli 2011

Jogiyanto. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Mantra, 2000. Demografi Umum. Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

Mantra, I.B. 2004. Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.

Marhaeni, AA IN. 2011. Tingkat Keberdayaan Perempuan Bali Dalam Jabatan Eselon di Provinsi Bali: Ditinjau Dari Dimensi Internal dan Eksternal. Disertasi. Yogyakarta: UGM

Ming Qi. 2012. The Analysis of Chinese Food Safety Issue: Legislations and Governmental Supervision. Chinese Law and Government. Vol. 45. No1, pp. 3-9

Nehen, Ketut. 2012. Perekonomian Indonesia. Denpasar: Udayana University Press

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2006, tentang Dewan Ketahanan Pangan

Tawakal, Ihwal. 2010. Tantangan Menuju Ketahanan Pangan. Kompasiana. Diunduh tanggal 20 Agustus 2012.

Undang-undang Negara RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan

Suhaimi, Uzair. (2012). Konversi Lahan Pertanian: Seberapa Cepat dan Di Belahan Nusantara Mana?, Jurnal Online, Diunduh tanggal 20 Agustus 2012